

TERAS

Rudi: Saya Hanya Teruskan Surat DPK

BATAMKOTA (BP) - Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengaku hanya meneruskan hasil keputusan rapat Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam terkait usulan Upah Minimum Sektoral (UMS) Batam yang dikembalikan Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

"Surat yang saya kirim hanya *nerusin* hasil rapat (DPK). Saya kan tidak ikut bahas, yang bahas tim itu (DPK, *red*). Tugas saya *ngirim*, bukan pengambil keputusan," kata Rudi Selasa (20/3). Rudi mengaku, surat penolakan dari Gubernur Kepri hingga kini belum ia dapat.

■ Baca **RUDI**:...Hal 13

KPPD Akui Kendaraan Dinas Tak Bayar Pajak

BATAMKOTA (BP) - Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kota Batam Teddymar mengaku masih banyak mobil dinas Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang belum membayar pajak. Namun dia mengklaim itu disebabkan terjadinya perubahan sistem pembayaran di Samsat, dari sebelumnya dibayar langsung secara manual, berubah menjadi pembayaran secara *online*.

"Memang ada sedikit kendala teknis.

■ Baca **KPPD**:...Hal 13



SEORANG warga melihat plat mobil milik anggota DPRD Batam yang sudah habis masa berlakunya, Selasa (20/3)

Rudi: Saya Hanya Teruskan Surat DPK

Sambungan dari hal 9

Dengan demikian poin penolakan tersebut belum ia ketahui. Merujuk pada penolakan tersebut, apakah UMS Batam akan dibahas kembali, ia menyampaikan akan mengikuti prosedur yang berlaku.

"Suratnya saya belum baca, saya akan baca dulu. (Suratnya) tak tahu di mana," ujarnya.

Senada dengan Rudi, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan apapun hasil rapat DPK Batam itulah yang akan diteruskan

oleh Pemko Batam ke Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

"Kami prinsipnya, ketidaksepakatan merupakan kesimpulan. Kesepakatan juga tetap akan jadi kesimpulan. Makanya kami teruskan ke gubernur," sebutnya.

Namun belakangan surat yang diteruskan ke gubernur dikembalikan karena ada poin yang dianggap tidak sesuai mekanisme yang berlaku. Pada prinsipnya di dalam hasil DPK seharusnya disepakati oleh semua elemen dalam DPK. "Ada satu yang tidak disepakati, yakni UMS untuk

sektor elektronik, kira-kira begitu isi penolakannya (gubernur)," ucapnya.

Terkait ini, Amsakar akan menyampaikan ke Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) mempertimbangkan dan melaksanakan mekanisme yang berlaku untuk menyelesaikan persoalan tersebut. "Saya akan sampaikan ke dinas, seperti apa mekanisme yang diamanahkan undang-undang. Kalau seandainya dilanjutkan barangkali sampai ke PTUN, akan ada sejumlah mekanisme nanti," paparnya. (adi)

KPPD Akui Kendaraan Dinas Tak Bayar...

Sambungan dari hal 9

Kalau tidak bayar saya rasa tidak. Sebab dari laporan terakhir, sudah banyak kendaraan dinas Pemko Batam yang membayar pajak," ujar Teddymar, Selasa (20/3).

Terkait berapa kendaraan dinas yang sudah membayar pajak, Teddymar mengaku tidak mengetahui angka pastinya. "Ya, kita harus cek dulu. Karena saya tak hafal. Terakhir yang bayar OPD (organisasi perangkat daerah) di Satpol PP," tuturnya.

Meskipun demikian, ia juga tak menampik jika di lapangan masih ada kendaraan pelat merah yang pajak bahkan plat nomornya sudah tidak berlaku lagi. "Kita sifatnya hanya mengimbau, baik itu untuk kendaraan pribadi atau dinas, tak ada perlakuan berbeda, sama-sama kita imbau taat pajak," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pengelolaan Aset Daerah Jefridin mengaku kaget terkait informasi banyak kendaraan dinas yang belum membayar pajak. Sebab, kata dia, masing-masing mobil dinas punya anggaran untuk membayar pajak.

"Masa iya, ya? Setahu saya dianggarkan untuk bayar pajaknya. Ada contohnya (yang tidak bayar pajak) ya, ada kami akan langsung tindaklanjuti," ucap Jefridin di Kantor DPRD Batam, kemarin.

Pria yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam itu, mengaku baru mendengar

informasi ini. Untuk itu, ia akan mengecek kebenaran informasi tersebut. Karena sudah dianggarkan, seharusnya dinas terkait taat dan membayarkan pajak kendaraan masing-masing. "Tidak ada alasan untuk tidak dibayar, harus bayar pajaknya. Kami akan cek ini," tegasnya.

Jefridin mengira ada dua kemungkinan terkait informasi tersebut. Pertama, mobil tertentu sudah dibayar pajaknya namun plat kendaraannya belum diganti. Kemungkinan kedua, mobil tersebut memang belum dibayar pajaknya. "Untuk memastikan ini perlu saya cek langsung," ucapnya.

Soal anggaran untuk pajak, juga disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Abdul Malik. Menurutnya, setiap OPD punya anggaran pembayaran pajak. "Tidak bayar pajak, saya kira perlu dipertanyakan juga. Tapi seingat saya anggaran untuk itu ada mata anggarannya," sebutnya.

Namun ia mengaku belum bisa memastikan, apakah ada mobil dinas yang belum bayar pajaknya. Memastikan ini ia akan berkoordinasi dengan OPD-OPD yang ada. "Makanya informasi yang beredar hari ini, dicek dulu kebenarannya," ujarnya.

Sebelumnya, ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Barang Milik Daerah Udin P. Sihaloho mengatakan, ba-

nyak kendaraan dinas Pemko Batam yang tercatat tidak taat membayar pajak. "Di satu sisi kita menyuruh masyarakat taat pajak. Di sisi lain, Pemko tidak melakukan kewajibannya membayar pajak," sesal Udin.

Tidak dibayarnya pajak kendaraan ini, menurut Udin, akan berimplikasi terhadap nilai aset kendaraan. Nilai aset akan turun karena ada penyusutan administrasi kelengkapan kendaraan. "Pemko hanya fokus membeli saja. Sementara pajak, perawatan, pemeliharaan dan lainnya tidak diperhitungkan," ujar Udin.

Biaya Pemeliharaan Tanggung Sendiri

Sebanyak 47 unik bekas mobil dinas anggota DPRD Batam kini sudah digunakan sejumlah pejabat di berbagai OPD lingkungan Pemko Batam. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Batam Jefridin. "Sudah kami bagi habis. Ada satu hingga dua di masing-masing dinas," katanya.

Ia mengungkapkan, mobil-mobil tersebut tidak dibebankan APBD terkait biaya operasional dan pemeliharaannya. Karena ada kesepakatan di awal penggunaan oleh pejabat tertentu untuk menanggung biaya operasionalnya. "Karena pemeliharaan dan minyak tak dianggarkan, maka yang pakailah yang membayar, mereka sepakat," sebut Jefridin. (rng/adi)

Penambangan Pasir Marak Lagi

Perbukitan di Dam Tembesi
Berubah Jadi Kolam Raksasa

SAGULUNG (BP) - Aktivitas tambang pasir darat di sekitar Dam Tembesi, Sagulung, marak lagi setelah sepekan penertiban yang dilakukan oleh Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (Ditpam BP) Batam. Tidak hanya di titik-

titik yang sempat menghilang saat penertiban, tapi juga di lokasi bekas penertiban.

Pantauan *Batam Pos* di lokasi penambangan pasir, Selasa (20/3) siang, sejumlah

■ Baca **PENAMBANGAN**..Hal 13

Penambangan Pasir Marak Lagi

Sambungan dari hal 9

pekerja terlihat sibuk mengangkat pasir dari lokasi tambang ke truk yang parkir berjejer di pinggir lokasi tambang. Proses pengerukan pasir menggunakan mesin penyedot, namun aktivitas menaikkan pasir ke truk dilakukan secara manual. Di sekitar lokasi penambangan juga bising dengan suara mesin penyedot pasir.

Lokasi penambangan pasir tersebut telah menyerupai kolam raksasa. Padahal, kawasan tersebut awalnya merupakan perbukitan. Tidak hanya itu, lingkungan di sekitar lokasi penambangan jadi tandus dan gersang. Sejatinya, di kawasan tersebut diperuntukkan untuk daerah tangkapan air.

Dampak lain dari aktivitas penambangan pasir tersebut, sisa-sisa tanah dibuang sembarangan di sekitar dam, sehingga dapat memicu pendangkalan dan mempersempit pinggir Dam Tembesi.

Sementara itu, sejumlah pekerja di lokasi penambangan pasir yang mengetahui kehadiran wartawan meminta untuk tidak mengambil gambar maupun menulis aktivitas mereka. "Kami cuma cari makan. Tak usah tulislah," ujar seorang pekerja.

Tak jauh dari lokasi pertama,

Batam Pos juga melihat titik penambangan pasir lainnya, bahkan tidak jauh dari perkebunan warga. Namun di lokasi tersebut memang tak ada aktivitas siang kemarin, tapi sejumlah truk pengangkut pasir dan satu unit alat berat parkir di dekat lokasi tambang itu. Beberapa pria yang diduga pekerja tampak menjaga lokasi tambang pasir tersebut. Setiap warga yang datang ke lokasi itu dicegah, termasuk *Batam Pos*. Mereka tak ingin aktivitas mereka diketahui banyak orang ataupun diliput media.

Selain di lokasi tersebut, lokasi tambang pasir juga terlihat di bibir dam lainnya, persisnya di belakang Perumahan Medio Raya. Meskipun tak ada lagi aktivitas penambangan lagi, namun di lokasi juga masih terlihat beberapa unit mesin penyedot pasir yang diletakan dekat lembah. Pipa-pipa penyedotan pasir hingga pembuangan air juga masih terpasang baik. Tidak ada pekerja ataupun kendaraan proyek yang ditemui di lokasi tersebut.

Beberapa warga sekitar mengaku sudah hampir sepekan belakangan ini aktivitas tambang pasir itu berhenti operasi. "Sebelum ada razia dari Ditpam itu, (tambang pasir) masih berjalan. Pasir itu diangkut pakai lori. Tapi

sudah sepekan ini tak ada lagi," tutur Semmy, warga Perumahan Medio Raya.

Selain itu, di dekat Panti Asuhan Permate diakui warga juga sudah lama beroperasi. Lokasi sekitar yang semula lahan perbukitan, kini juga sudah berubah. Kondisinya curam dan sebagian sudah berubah jadi lembah.

Jika aktivitas tambang pasir tersebut dibiarkan, warga khawatir akan berdampak bagi lingkungan sekitar, termasuk Dam Tembesi yang belum sempat dipergunakan itu. "Bisa-bisa tutup lagi Dam itu. Tanah yang disedot bersama pasir ditimbun ke lokasi dam," sebut Semmy.

Bahas dengan Stakeholder

BP Batam akan menggelar rapat dengan pihak terkait untuk membicarakan masalah tambang pasir ilegal yang marak terjadi di Batam. Harapannya melalui rapat tersebut aktivitas penambangan pasir terutama yang ada di sekitar Dam Tembesi bisa dihentikan.

"Kita akan bahas ini dengan para *stakeholder*. Kita undang semua pihak untuk membicarakan ini," kata Direktur Pengamanan BP Batam Brigjen Suherman, kemarin. Ia mengaku kecewa karena masih ada laporan mengenai

tambang pasir ilegal yang beroperasi di sekitar Dam Tembesi pasca penertiban beberapa waktu lalu. "Laporan akan ditindaklanjuti," katanya.

Sementara itu, Susanto dari Satuan Pemeriksa Internal (SPI) BP Batam mengatakan, penertiban akan kembali dilakukan di Dam Tembesi. Ini untuk menjaga kerusakan yang paling parah di lokasi Dam yang menjadi cadangan untuk air bersih di Batam.

"Kemungkinan kita akan melakukan penertiban lagi. Kalau yang sebelumnya mungkin sudah bocor, makanya tak ada alat berat di lokasi," katanya.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD Kepri Ruslan kasbultov mengatakan PPNS Distamben Kepri harus bertanggungjawab atas kerusakan lahan tersebut. Ia berharap BP Batam mengundang PPNS Distamben Kepri. "Masalah tambang adalah kewenangan provinsi. PPNS apakah tidak tahu masalah ini. Dan sudah sejauh mana tindakan mereka. Ini perlu dipertanyakan," ujarnya.

Ia mendukung digelarnya rapat yang diinisiasi BP Batam tersebut. Harapannya ada solusi dan langkah untuk menghentikan tambang pasir tersebut. "Mari kita cintai alam. Ketersediaan air bersih harus terjamin. Tambang pasir di sekitar dam harus dihentikan," katanya. (eja/ian)

Jalan Seipanas-Bengkong Dilebarkan

BATAMKOTA (BP) - Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan pembangunan jalan dari Simpang Kuda Seipanas ke Bengkong Seken dimulai pada Mei mendatang. Selasa (20/3) kemarin, Rudi melihat langsung kesiapan di lapangan dengan meninjau jalan yang akan dilebarkan. Ia menginginkan pembangunan jalan sesuai dengan desain yang telah disiapkan.

"Saya mau melihat seberapa persen persiapan masyarakat yang membongkar bangunannya sendiri. Saya juga ingin memastikan arah pelebarannya, supaya sesuai dengan perencanaan," kata Rudi.

Taman di Simpang Kuda akan dibongkar habis. Karena titik ini akan menjadi simpang tiga lengkap dengan lampu lalu lintasnya.

Pada persimpangan ini mediannya dibuka sehingga pengendara bisa langsung belok kanan dari arah Seipanas. Seipanas ini dibuat jadi dua-dua lajur. Sedangkan untuk yang jalur antara BNI Seipanas ke *underpass* akan dibuat lima lajur kiri dan lima kanan.



WALI Kota Batam Muhammad Rudi meninjau kesiapan rencana proyek pelebaran jalan di Simpang Kuda, Seipanas, Selasa (20/3). Rencananya proyek pelebaran dari Simpang Bengkong Seken akan dimulai Mei mendatang.

Jalan Seipanas-Bengkong Dilebarkan

Sambungan dari hal 9

“Pelebaran di jalur utama Jalan Laksamana Bintan ini akan menyentuh sampai ke halaman ruko di sebelah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Taman Langgeng Seipanas. Median jalannya juga akan digeser, disesuaikan dengan kondisi jalan setelah pelebaran. Jalan yang menuju *underpass* ini akan dibuat lurus, tidak belok begini lagi. Maka kiri kanan sama. Misal kiri 15 meter, kanan juga 15 meter. Me-

dian kita geser sebelah sana,” jelasnya lagi.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA) Kota Batam Yumasnur mengatakan, akhir Maret atau awal April ini akan mulai dilakukan lelang pengerjaan untuk proyek pelebaran Seipanas-Bengkong Seken. Diharapkan Mei sudah mulai bekerja.

Sementara pembangunan jalan yang dilakukan oleh provinsi (*BNI-Underpass*), sudah memasuki proses lelang. Sehingga pertengahan April sudah mulai dikerjakan. Pe-

kerjaan, kata dia, dilakukan secara bertahap. “Tahun ini buka saja dulu, tahun berikutnya dilanjutkan lagi,” kata Yumasnur.

Sementara itu, Camat Bengkong M Tahir mengatakan, berdasarkan hasil pendataan, terdapat 313 ruko dan kios yang ada di sepanjang jalur Seipanas-Bengkong Seken. Rinciannya yaitu 66 bangunan di Kelurahan Bengkong Laut, 135 bangunan di Bengkong Indah, dan 106 bangunan di Seipanas.

“Yang dikasih SP (surat pe-

ringatan) 350 bangunan, yang sudah dibongkar 150 bangunan. Mayoritas bangunan tambahan. Kalau bangunan besar jenis ruko tidak ada yang kena, paling pagar atau halaman. Tempat ibadah, puskesmas, sekolah juga pagarnya yang kena, sekitar satu meter,” sebut Tahir.

Kemarin terlihat pemilik bangunan yang terkena dampak pelebaran jalan mulai melakukan pembongkaran. Sebagian sudah ada yang membongkar kiosnya. **(mta/yui)**